



Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengolah Ikan Teri Desa Hadakewa dalam Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Desa

Mochammad Rozikin^{1*}, Hero Christian Rage Valentin Lius Wejak², Florensa Oktavia Leatomu³

^{1, 2, 3} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat pengolah ikan teri di Desa Hadakewa dalam memanfaatkan dana desa untuk mendukung pembangunan ekonomi desa. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data alokasi dana desa yang diperoleh dari pemerintah desa, sedangkan data primer adalah data yang diolah oleh penulis. Hasil penelitian ini adalah adanya pemanfaatan dana desa secara optimal untuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang mengolah potensi ikan teri secara maksimal, meningkatkan pengetahuan dan wawasan akan potensi tersebut, pelatihan keterampilan sehingga terjadi pembangunan ekonomi lokal melalui pemasaran hasil produksi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi lokal dari pengolahan ikan teri bersifat kolaboratif dimana pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan swasta membangun kemitraan untuk mendukung dalam pemanfaatan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan saran yaitu pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan hasil produksi dan membangun kemitraan dengan penyedia jasa ekspedisi untuk mengatasi besarnya biaya pengiriman.

Kata kunci: Pemberdayaan, Pembangunan Ekonomi Lokal.

Abstract

This research aims to determine the empowerment of anchovy processing community groups in Hadakewa Village, with a focus on their utilization of village funds to support village economic development. The research uses a qualitative research method with a descriptive approach to explain the process of community empowerment. The data used are secondary data and primary data. Secondary data is village fund allocation data obtained from the village government, while primary data is data processed by the author. The results of this study are the optimal utilization of village funds for the empowerment of community groups that process the potential of anchovies to the fullest, increasing knowledge and insight into this potential, skills training so that local economic development occurs through the marketing of production products that have an impact on increasing income and creating employment opportunities. Local economic development from anchovy processing is collaborative, where the village government, district government, and private sector build partnerships to support the utilization of local potential for community welfare. This study provides suggestions, namely the procurement of infrastructure to increase production and build partnerships with expedition service providers to overcome the high shipping costs.

Keywords: Empowerment, Local Economic Development.

Histori Artikel:

Diterima 03 Desember 2024, Direvisi 02 Januari 2025, Disetujui 19 Januari 2025, Dipublikasi 20 Januari 2025.

***Penulis Korespondensi:**

herowejak96@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.392>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak yang begitu besar bagi desa berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Undang-undang ini juga memberikan ruang untuk diterapkan paradigma baru dalam Pembangunan desa yaitu “Desa Membangun” yang memberikan makna bahwa pembangunan dapat dilakukan oleh desa dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Dana Desa adalah salah satu sumber daya yang merupakan implementasi dari kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mendukung Pembangunan desa, mensejahterakan kehidupan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat otonomi daerah dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya mereka.

Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks, pembangunan di era saat ini telah bergerak ke arah perspektif *people centered development* di mana masyarakat menjadi fokus dan aktor utama dalam pembangunan, ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan, agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Menurut Korten dalam Patton, (2005) pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Artinya usaha perubahan yang berlangsung dalam masyarakat dan pendekatan pembangunan berorientasi pada masyarakat perlu diubah sebagai figur sentral pembangunan. Dengan demikian, berdasarkan beberapa teori para ahli diatas, maka sejatinya Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh masyarakat sebagai aktor utama dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik secara mandiri. Masyarakat tidak hanya memposisikan dirinya sebagai objek yang hanya menerima hasil Pembangunan, tetapi ikut berpartisipasi aktif untuk mengelola sumber daya untuk memberikan hasil yang berguna. Hal ini dilakukan karena adanya kesadaran bahwa kemandirian masyarakat bisa terjadi jika sumber daya itu diketahui berada di sekeliling masyarakat tetapi belum mampu dimanfaatkan secara baik. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik jika masyarakat memperoleh dukungan dari pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang diterapkan pada pemerintah lokal desa dalam rangka pembangunan kualitas kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dimana masyarakat berperan sebagai aktor utama, sehingga keberhasilan Pembangunan ditentukan sendiri oleh masyarakat. Widanti, (2011) mengungkapkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang saat ini dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Sebagaimana pendapat Gitosaputro & Rangga K.K (2015) bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dalam upaya memberdayakan masyarakat lokal selain memberikan kewenangan berskala lokal kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada diwilayahnya, pemerintah pusat memberikan sumber daya

yang bersifat stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang lebih produktif dan bernilai ekonomi.

Dana desa adalah alokasi anggaran kepada pemerintah desa yang bersumber dari APBN dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dikutip dari Redaksi DJPB pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/> bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. 70% dari total transfer dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Sebagai salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa, pemberdayaan kelompok usaha yang sesuai potensi ekonomi masyarakat desa adalah bentuk dari optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendukung kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan ekonomi lokal desa. Dana desa diberikan dengan harapan besar untuk mengurangi kesenjangan Pembangunan dan memberantas kemiskinan masyarakat. Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya lokal agar bernilai ekonomi dan menjadi sumber pendapatan masyarakat akan berkontribusi mengurangi angka kemiskinan baik secara lokal maupun nasional.

Kelompok nelayan teri Desa Hadakewa adalah kelompok masyarakat yang diberdayakan oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki desa yaitu pengolahan ikan teri dengan nama brand adalah "Teri Hadakewa". Dikutip dari <https://kupang.tribunnews.com/2020/11/07/bermula-dari-sorga-tercium-istana-aroma-teri-hadakewa-menembus-nusantara? page=all>, Desa Hadakewa dipatri sebagai penghasil ikan tertinggi di Lembata. Rata-rata produksi 10ton ikan basah dan kering setiap dua bulan. Setahun bisa mencapai ratusan ton. Namun bertahun-tahun lamanya tak berdampak pada kehidupan warga. Tetap miskin. Anak-anak sekolah dasar banyak yang drop-out. Membantu orangtua (melaut, ke kebun) memperkuat ekonomi keluarga. Klemens (Kepala Desa) pun membangun sejumlah infrastruktur. Menunjang profesi nelayan agar produktif. Dananya? Memanfaatkan dana desa. Beberapa sarana pendukung pun dibangun. Mulai dari tempat pengeringan, pengadaan bahan baku hingga bahan kemasan ikan teri. Para nelayan disuport habis-habisan. Klemens tak mau setengah-setengah. Total untuk rakyat. Lebih lanjut, Unit usaha pengelolaan ikan teri memberikan pekerjaan kepada para ibu-ibu yang bertugas mengolah ikan teri. "Rata-rata penghasilan mereka per hari mencapai 100 ribu rupiah"

Berdasarkan data maka, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pemerintah desa memanfaatkan secara optimal dana desa untuk mendukung pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat pengolah teri dalam membangun ekonomi lokal desa.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Konsep Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari bahasa Inggris "*Empowerment*", pemberdayaan berasal dari kata dasar "*power*" yang berarti kekuatan berbuat, mencapai,

melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat digunakan karena sumber masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, ketidakadilan adalah ketidakberdayaan masyarakat (Soetomo, 2011).

Menurut Edi Suharto (2005) Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Widjaja (2002) pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi keajaaran bawah yang intinya pemberdayaan merupakan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandiri, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut Soeharto (2006) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2016), menjelaskan definisi pemberdayaan masyarakat ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya memengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Usaha untuk meningkatkan kemampuan untuk masyarakat dilakukan agar ada kesadaran untuk segera memulai upaya memperbaiki kehidupan. Berdasarkan pendapat ini maka pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik jika masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola potensi yang ada di sekitarnya, ditingkatkan kemampuannya untuk memiliki wawasan bagaimana memahami dan menyadari bahwa potensi yang ada di sekitarnya dapat memberikan dampak ekonomi bagi kehidupan, dilatih untuk memiliki keterampilan dalam mengelola potensi tersebut sehingga memiliki kemampuan teknis yang baik dan diberikan sumber daya sebagai modal untuk mengelola sumber daya atau potensi wilayah mereka.

b. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) didefinisikan sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan maupun aset pengalaman (Haeruman, 2001).

Menurut ahli ekonomi *Intenational Labour Organization* (ILO) pengembangan Ekonomi Lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah serta masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerja sama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Sedangkan menurut *Word Bank* (2002) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses di mana masyarakat, pemerintah, para pengusaha, dan sektor non-pemerintah bekerja bersama-sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi lokal bersifat kolaboratif, di mana organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat membangun kerja sama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dengan memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan adanya pembangunan ekonomi lokal, masyarakat diberdayakan agar mampu dan mandiri untuk meningkatkan kesejahterannya, dan menyadarkan masyarakat bahwa peningkatan kualitas hidup ditentukan oleh mereka sendiri jika mampu mengolah potensi lokal yang ada di sekitar mereka.

Blakely dalam Supriyadi (2007) menyatakan keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu, Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha, Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran, Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi pada level lokal sebagai tujuan dari pemberdayaan kelompok masyarakat melalui proses kolaborasi atau keterlibatan pemerintah desa dapat terwujud melalui aktivitas yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kemitraan

Kemitraan lebih dikenal dengan kerja sama atau gotong-royong baik antar individu atau kelompok. Kemitraan dilakukan dengan tujuan mempermudah penyelesaian atau pelaksanaan suatu kegiatan yang mana memiliki dampak atau manfaat bagi yang melaksanakannya. Menurut Rachmat (2004) Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara pihak yang strategis, bersifat sukarela dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan. Hafsa (2000) juga menyapaikan pendapat bahwa kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan bersama. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi lokal dapat terlaksana jika ada kemitraan yang dibentuk pada level pemerintah lokal dan masyarakat lokal untuk mencapai tujuan bersama yaitu peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat.

2. Kesempatan kerja

Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan juga mengembangkan kualitas pekerjaan dari masyarakat yang sedang bekerja tetapi belum maksimal. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjadi sektor ekonomi rumah tangganya tercukupi. Semakin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan kerja atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat menyerap banyak tenaga kerja maka ekonomi lokal akan berkembang dan terus meningkat.

3. Aspek ekonomi

Pemberdayaan masyarakat memiliki satu tujuan yaitu peningkatan perekonomian masyarakat lokal melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada diwilayahnya. Hasil pemanfaatan sumber daya lokal tersebut memiliki nilai jual atau memiliki penawaran pada pasar karena adanya permintaan konsumen, maka dilakukan proses pemasaran oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian aspek ekonomi terjadi. Masyarakat lokal yang diberdayakan diharapkan mampu menawarkan hasil olahan sumber daya sesuai dengan permintaan pasar, sehingga proses jual-beli dapat terjadi dan menjadi sumber pendapatan.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di desa melibatkan berbagai aspek yang harus digali lebih mendalam dan komprehensif. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Locke Spirduso dan Silverman (Creswell, 2010) bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa, kelompok atau interaksi sosial tertentu.

Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2014). Selain itu alasan yang mendorong peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah ingin mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan bagaimanakah Pembangunan Ekonomi Lokal melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Hadakewa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Ikan Teri

Desa Hadakewa terletak di Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, berjarak sekitar 15 Km arah timur Kota Lewoleba. Memiliki status perkembangan desa sebagai desa dengan kategori maju, dan juga merupakan desa wisata dengan menawarkan destinasi wisata bahari. Secara geografis, Desa hadakewa berada pada wilayah pesisir sehingga memiliki berbagai potensi baik di laut maupun pesisir laut salah satunya dari sektor perikanan. Rata-rata produksi ikan basah dan kering dari Hadakewa 10 ton setiap bulan. Terdapat tujuh jenis ikan teri di Desa Hadakewa yaitu Merang, Peseng-Peseng, Siro, Mao Merah, Mao Putih, Gele dan Phada yang menjadi produk olahan kelompok nelayan teri desa. Hasil produksi Teri Hadakewa oleh kelompok nelayan sampai 2 ton teri kering setelah diolah dari kurang lebih 6 ton teri basah dalam sekali produksi.

Sebelum dilakukan pemberdayaan kelompok nelayan teri, aktivitas produksi ikan teri hanya dilakukan per orang atau individu dengan hasil produksi yang kecil dan hanya mampu memenuhi pasar lokal. Hasil ini dipengaruhi oleh bahan baku yang dibeli secara terbatas dari kapal-kapal penangkap dan sarana pengeringan ikan yang masih tradisional serta keterbatasan modal.

Tabel 1. Perbandingan Pemanfaatan Potensi Ikan Teri Sebelum dan Sesudah Pemberdayaan.

No	Obyek	Sebelum diberdayakan	Sesudah diberdayakan
1	Bahan baku teri basah	Dibeli dari kapal nelayan yang bukan milik desa	Diperoleh sendiri dengan kapal penangkap milik kelompok
2	Pelaku	Perorangan	Kelompok
3	Hasil Produksi	Tidak diketahui	Sampai dengan 2 ton
4	Kualitas Produk	Tidak dalam kemasakan	Dalam kemasakan 100 gram, 250 gram, 500 gram dan 1 Kg yang higienis dan menarik
4	Pasar	Pasar Lokal dan hanya transaksi <i>Offline</i>	Pasar Lokal dan Nasional serta melalui <i>E-Commerce</i>
5	Kapal Penangkap	Tidak dimiliki	3 Kapal Penangkap

Sumber: Data Primer, 2024

Adanya perubahan dari semua objek dalam aktivitas pemberdayaan pengolahan ikan teri menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi tersebut secara luas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Peningkatan hasil produksi yang mampu memenuhi pasar yang lebih luas merupakan dampak pemanfaatan dana desa dari 2018 sampai tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Hadakewa untuk mendukung kelompok masyarakat dalam mengolah potensi desa.

Tabel. 2 Pemanfaatan Dana Desa

No	Tahun	Jumlah Dana Desa yang di Alokasikan untuk Pemberdayaan	Peruntukan
1	2018	85.934.000	Tempat/Rak Pengeringan, Waring, Kemasakan dan Modal Pembelian Bahan baku Ikan, pelatihan
2	2019	128.900.000	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
3	2020	200.000.000	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan, Mesin Packing, Pelatihan peningkatan kapasitas, promosi
4	2022	58.124.424	Alat bantu tangkap

Sumber: Data Primer, 2024

Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan kelompok nelayan berbasis kebutuhan dimana melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan dan mendengarkan secara langsung usulan dari kelompok nelayan sehingga terjadi pemberdayaan kelompok nelayan yang efektif, efisien dan produktif.

Peningkatan Wawasan dan Kemampuan.

Terbentuknya kelompok nelayan pengolah ikan teri di Desa Hadakewa merupakan hasil dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan wawasan masyarakat untuk menyadari potensi dari ikan teri. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Hadakewa bahwa Sebelumnya ikan teri langsung dijual kepada tengkulak dan sebagian hanya diolah oleh beberapa individu yang hanya dijual di pasar lokal. Pada tahun 2017 melihat ada potensi ikan teri, maka masyarakat diajak dan diberikan pemahaman akan potensi ikan teri jika dikerjakan dan diolah secara bersama-sama sehingga terbentuklah kelompok nelayan pengolah ikan teri yang diberdayakan oleh desa. Dengan dukungan dana desa, di tahun 2018 dialokasikan dana desa sebesar Rp. 85.934.000

untuk pengadaan sarana prasarana pengolahan ikan teri serta modal bagi kelompok untuk pembelian bahan baku. Pengalokasian anggaran dana desa selain memberikan manfaat sebagai sumber daya untuk mendukung kegiatan juga berperan sebagai stimulan atau sarana yang menyadarkan masyarakat akan adanya perhatian dari pemerintah desa.

Kelompok pengolah ikan teri terdiri dari nelayan dan juga masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap kemudian diberikan pelatihan untuk memiliki kemampuan untuk mengolah ikan teri. Peningkatan kemampuan yang dilakukan agar anggota kelompok memiliki pengetahuan seperti penyortiran ikan berdasarkan jenisnya karena setiap jenis ikan memiliki tekstur dan rasa yang berbeda, pembersihan ikan yang baik agar tidak tercampur pasir atau kotoran lainnya, penjemuran ikan dengan tingkat kekeringan yang benar agar tidak rusak atau busuk. Peningkatan wawasan terhadap kelompok masyarakat pengolah ikan teri bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas dengan cara menjual hasil olahan ikan teri dalam beberapa ukuran yaitu 250 gram, 500 gram dan 1 Kg sehingga dapat menjangkau semua jenis konsumen baik individu, keluarga maupun restoran/rumah makan.

Hasil yang diperoleh dari peningkatan wawasan dan kemampuan yang dilakukan sejak 2018 hingga saat ini adalah meningkatnya hasilnya produksi yang mencapai 2 ton sekali panen, jangkauan pasar yang lebih luas baik secara *offline* maupun melalui *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee dan media sosial lainnya.

Pengetahuan memiliki dampak yang luas khususnya dalam pemberdayaan masyarakat karena mampu menumbuhkan sifat inovatif dari pelaku atau aktor yang terlibat dalam pemberdayaan dan juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konsep pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikann dampak *sustainability* bagi kegiatan suatu kelompok masyarakat.

Pelatihan Keterampilan

Keterampilan kelompok nelayan ikan teri yang ditingkatkan oleh pemerintah desa melalui bimbingan dan pelatihan meliputi keterampilan akan penyortiran bahan baku ikan teri berdasarkan jenis dan bentuknya, penggunaan peralatan/mesin packing kemasaaan, mengoperasikan toko online, menanggapi atau merespon setiap interaksi dari konsumen pada toko online, mempromosikan produk melalui media sosial dan juga keterampilan membaca peluang pasar serta menginventarisir waktu-waktu tertentu dengan permintaan tinggi seperti pada hari raya dan pada saat musim hujan agar mampu memenuhi permintaan pasar tersebut.

Keterampilan yang miliki menciptakan efektivitas, produktivitas dan kemandirian bagi setiap individu didalam kelompok. Evaluasi dan peningkatan kapasitas setiap individu dilakukan secara berkala untuk mencegah penurunan produktivitas serta mengatasi kecendrungan kondisi jenuh yang dapat terjadi.

Menurut Robbins (2000), Keterampilan dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

1. *Basic literacy skill* adalah keahlian dasar yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap orang seperti membaca, menulis, berhitung serta mendengarkan. Secara umum anggota kelompok masyarakat pengolah ikan teri dengan kualifikasi pendidikan sekolah lanjutan memiliki kemampuan dasar yang baik sehingga mereka mampu memahami maksud dan tujuan dari pemberdayaan yang diberikan.
2. *Technical skill* adalah keahlian secara teknis yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti mengoperasikan komputer dan alat digital lainnya. Kemampuan teknis anggota kelompok masyarakat pengolah ikan teri yang diberikan melalui pelatihan mencakup pengoperasian mesin *packing* dan peralatan pendukung lainnya yang modern serta mengoperasikan toko *online* untuk pemasaran produk.
3. *Interpersonal skill* adalah keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi satu sama lain seperti mendengarkan seseorang memberi pendapat dan bekerja secara tim. Dalam

kehidupan masyarakat desa komunikasi yang dibangun sangat baik dengan menggunakan media lokal seperti bahasa daerah dan budaya komunikasi daerah lainnya. Kehidupan masyarakat desa yang penuh gotong royong dan harmonis memberikan manfaat yang baik dalam aktivitas kelompok masyarakat pengolah ikan teri sehingga tidak pernah terjadi perselisihan atau kesalahpahaman karena sifat kekeluargaan yang kuat.

4. *Problem solving* adalah keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logikanya. Kemampuan pemecahan masalah secara umum dimiliki oleh pemerintah desa karena dianggap lebih mampu secara pengetahuan dan jaringan kerja sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan, Solusi pemecahan masalah juga muncul dari anggota kelompok masyarakat seperti Solusi terhadap masalah yang cukup teknis seperti tangkapan bahan baku yang berkurang dan spesifikasi kapal penangkap yang cocok untuk tangkapan dan kondisi laut. Musyawarah/rembug adalah metode yang selalu digunakan oleh masyarakat desa dalam memecahkan masalah secara bersama-sama.

Pembangunan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan kelompok nelayan pengolah ikan teri telah memberikan dampak yaitu pembangunan ekonomi lokal. Kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok masyarakat pengolah ikan teri, Bank NTT, BUMDes menciptakan jaringan kerja sama untuk kelancaran proses kegiatan pemberdayaan khususnya pemasaran hasil produksi. Pemerintah desa menyediakan dukungan anggaran dana desa, kelompok masyarakat mengolah potensi ikan teri, BUMDes melakukan pemasaran produksi, dan Bank NTT menyediakan sarana pembayaran.

Pembangunan ekonomi lokal harus bersifat kolaboratif di mana organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat membangun kerja sama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dengan memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan adanya pembangunan ekonomi lokal masyarakat diberdayakan agar mampu dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan menyadarkan masyarakat bahwa peningkatan kualitas hidup ditentukan oleh mereka sendiri jika mampu mengolah potensi lokal yang ada di sekitar.

Kelompok masyarakat pengolah teri mendapatkan bayaran setiap hari sesuai dengan apa yang dikerjakan dan dihasilkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Theresia bahwa dengan pengolahan ikan teri dirinya lebih mandiri secara ekonomi di mana sebelumnya setiap hari hanya mendapatkan kurang lebih 30 ribu rupiah dari hasil penjualan kayu bakar dan sayuran, maka kini setiap hari memperoleh upah lebih dari 100 ribu rupiah dari pengolahan ikan teri.

Perubahan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat memberikan kesadaran bahwa pemberdayaan memberikan kemandirian ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengolah potensi yang tersedia dengan dukungan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa dan pada akhirnya peningkatan kualitas hidup ditentukan oleh mereka sendiri melalui pemanfaatan potensi desa secara maksimal.

Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal

Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal sebagai tujuan dari pemberdayaan kelompok masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan

Pendapatan masing-masing anggota kelompok pengolah ikan teri kurang lebih seratus ribu per hari. Dikatakan meningkat karena sebagian besar beranggotakan para ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Peningkatan pendapatan dalam pembangunan ekonomi lokal adalah proses strategis, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal/desa melalui

pemanfaatan potensi desa secara optimal. Peningkatan pendapatan masyarakat menggunakan strategi optimalisasi pemanfaatan dana desa secara efektif dan digitalisasi dan pemasaran *online* untuk menjangkau konsumen-konsumen yang lebih luas dan lebih banyak.

2. Perluasan Kesempatan Kerja

Pengolahan ikan teri memberikan kesempatan kerja yang tidak terbatas kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin dan umur. Besarnya produksi bahan baku dari hasil tangkapan tiga kapal yang dimiliki dan permintaan yang tinggi dari pasar yang sudah menjangkau wilayah secara nasional membuat pengolahan ikan teri menyerap tenaga kerja dari masyarakat untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan teri. Saat ini sudah menyerap 30 orang ibu-ibu yang bekerja di darat dan 20 orang pria di kapal penangkap ikan.

Perluasan kesempatan kerja dalam pengembangan ekonomi lokal memiliki tujuan menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Produksi dan Pemasaran

Produksi olahan ikan teri saat ini terjadi peningkatan yang signifikan karena adanya dukungan pendanaan melalui dana desa sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya memenuhi pasar lokal tetapi sudah mampu menembus pasar nasional dengan memanfaatkan *marketplace* dalam *e-commerce*. Sejak tahun 2020 dilakukan pengiriman rutin setiap minggu ke Jakarta yang sebelumnya berskala rumahan dan hanya dipasarkan pada pasar lokal

4. Kemitraan

Kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan yang bertujuan untuk pemenuhan tujuan masing-masing yang lebih cepat dan efektif. Keberhasilan pengembangan ekonomi lokal pada pemberdayaan kelompok pengolah ikan teri terjadi karena telah dibangun kemitraan yang saling mendukung dalam pencapaian tujuan para pihak. kemitraan yang dibangun dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- a. Kelompok Masyarakat: berperan mengolah ikan teri yang menjadi potensi desa.
- b. Pemerintah Desa: berperan menyediakan anggaran pemberdayaan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2022 dengan total dana desa yang dialokasikan Rp. 472.958.424, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- c. Pemerintah Kabupaten: berperan sebagai penghubung antara desa dengan lembaga keuangan untuk membangun kemitraan, mengawasi penggunaan dana desa agar sesuai dengan tujuan pemberdayaan, mempromosikan produk ikan teri, bantuan keuangan sebesar Rp. 200.000.000 sebagai dukungan dan apresiasi.
- d. Bank NTT: berperan menyediakan alat pembayaran non tunai/digital, memfasilitasi jaringan pasar yang lebih luas, mempromosikan produk ikan teri dan bantuan keuangan melalui dana CSR.
- e. BUMDes: berperan membantu dalam pemasaran produk yang lebih luas dengan memanfaatkan *e-commerce*.
- f. Insan Press/Media massa *online*: berperan dalam membantu mempromosikan produk kepada khalayak luas.

Kemitraan ini bersifat strategis dengan prinsip saling membutuhkan, mendukung dan menguntungkan dan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan khususnya pemberdayaan kelompok masyarakat pengolah ikan teri. Hasil dari kemitraan yang dibangun

membuat produksi ikan teri meningkat, menjangkau pasar nasional, kemudahan dalam transaksi jual-beli dan pada akhirnya memberikan dampak ekonomi lokal dengan meningkatnya pendapat para anggota kelompok.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan memberikan dampak perbaikan-perbaikan pada level lokal. Sebagaimana Mardikanto, dkk (2014), menjelaskan peran dari pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*). Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Pemerintah desa sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dana desa mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan cara memberikan pengetahuan dan wawasan yang membangun kesadaran masyarakat akan potensi wilayah yang dapat memberikan dampak ekonomi.
2. Perbaikan Usaha (*Better Business*). Perbaikan bisnis yang dilakukan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Pemanfaatan dana desa untuk pengolahan ikan teri yang menjadi potensi desa memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada anggota kelompok dan juga kepada sektor lainnya seperti wisata desa.
3. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*). Pemberdayaan kelompok pengolahan ikan teri yang memanfaatkan dana desa memberikan hasil secara ekonomi yaitu peningkatan pendapatan seluruh anggota kelompok. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan yang rendah, sekarang memiliki penghasilan yang lebih baik, stabil melalui hasil pemasaran produk olahan.
4. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*). Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Dengan adanya pemberdayaan pengolahan ikan teri, secara langsung berdampak pada kesadaran masyarakat untuk menjaga laut dari penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan kebersihan tepi pantai karena keduanya mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.
5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*). Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Kemampuan ekonomi akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik seperti kemampuan orang tua untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak, kecukupan asupan makanan bagi ibu hamil, bayi dan balita serta aspek kehidupan lainnya.
6. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*). Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan kelompok pengolah ikan teri memberikan kemandirian dan kesadaran bagi masyarakat akan pemanfaatan terhadap potensi yang tersedia akan memberikan dampak ekonomi yang besar jika setiap individu memiliki kemauan yang kuat untuk berpartisipasi dan pemerintah desa memfasilitasi melalui pemanfaatan dana desa.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan karena sebuah wilayah memiliki potensi yang dipandang mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat tetapi belum adanya kesadaran dari masyarakat akan potensi tersebut yang diakibatkan karena tidak memiliki modal untuk mengelola dan memanfaatkannya.

Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan suatu aktivitas tentu terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyebabkan rendahnya efektivitas. Pemberdayaan kelompok nelayan teri memiliki

beberapa faktor penghambat yang kemudian diperlukan Solusi untuk mengatasinya. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Jumlah kapal penangkap ikan yang masih sedikit dengan ukuran yang belum terlalu besar sehingga belum mampu memenuhi permintaan ekspor oleh perusahaan dari Cina.
2. Keterlibatan anak-anak muda yang belum sepenuhnya terlibat dan sadar akan peluang potensi ini sehingga belum mendominasi kelompok nelayan.
3. Alokasi dana desa yang terbatas dan penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik di desa dan yang bersifat *mandatory* dari pemerintah pusat yang masih cukup besar, membuat kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan kelompok nelayan belum sepenuhnya terpenuhi.

Ongkos pengiriman keluar wilayah yang cukup tinggi sehingga menyulitkan konsumen dalam skala rumah tangga karena biaya pengiriman hampir sama dengan harga produk per kilogram.

KESIMPULAN

Adanya pemanfaatan dana desa secara optimal untuk kegiatan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat untuk mengolah potensi di wilayah Desa Hadakewa yaitu ikan teri yang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Pemanfaatan dana desa yang optimal untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat memberikan perbedaan dan dampak yang cukup signifikan terhadap obyek-obyek dalam kegiatan pengolahan ikan teri oleh masyarakat desa seperti peningkatan dalam hasil produksi, kualitas produk dan jangkauan pemasaran hasil produksi. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa dapat tercapai karena pemerintah desa berhasil melaksanakan indikator-indikator yang menentukan keberhasilan kegiatan pemberdayaan yaitu peningkatan wawasan dan kemampuan serta pelatihan keterampilan. Pemberdayaan kelompok masyarakat pengolah ikan teri berhasil memberikan dampak ekonomi lokal desa karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, peningkatan jangkauan pemasaran hasil produksi dan kemitraan yang terbangun baik dengan pemerintah, masyarakat dan swasta. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian antara lain keterbatasan waktu untuk pengumpulan data dan observasi dalam penelitian, dan keterbatasan akses terhadap beberapa data seperti data laporan pertanggungjawaban desa secara online kepada instansi yang berwenang yaitu Kementerian keuangan selaku penyalur dana desa. Keterbatasan ini kedepannya menjadi perhatian bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk menyempurnakan penelitiannya.

Adapun beberapa implikasi dari hasil penelitian ini adalah

1. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah desa untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat desa serta mengolah potensi-potensi lainnya yang terdapat di wilayah desa untuk meningkatkan ekonomi lokal desa
2. Peningkatan wawasan dan Pelatihan keterampilan bagi kelompok masyarakat memberikan dampak yang besar dalam kegiatan pemberdayaan seperti peningkatan hasil produksi dan kualitas hasil produksi
3. Dengan adanya kerjasama/kemitraan terhadap pemerintah dan swasta membantu masyarakat mengatasi hambatan-hambatan dalam pengolahan ikan teri seperti ketersediaan modal sebagai biaya produksi serta memberikan kemudahan bagi kelompok untuk menjangkau pasar yang lebih luas untuk kepentingan pemasaran produksi.

Hasil penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengolah ikan teri, maka beberapa saran yang diberikan untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas antara lain:

1. Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana berupa kapal penangkap ikan yang lebih besar dengan daya tangkap dan tampung yang besar, yang membutuhkan dana yang besar maka, dapat dilakukan melalui pengadaan dengan sistem *multiyears* agar mampu didanai oleh dana desa sehingga tidak menghambat aktivitas pembangunan lainnya yang menggunakan dana desa.
2. Meningkatkan hasil produksi, meningkatkan hasil penjualan dan menjangkau konsumen yang lebih luas agar pendapatan kelompok nelayan teri meningkat, sehingga dengan hasil ini dapat dijadikan pemicu atau daya tarik bagi anak-anak muda untuk bergabung dan menjadi bagian dalam kelompok nelayan teri.
3. Pemerintah desa diharuskan mencari sumber-sumber dana lainnya yang dapat menopang kegiatan pembangunan di desa dan juga menarik investor untuk berinvestasi di desa dengan potensi ikan teri agar terjalin kerja sama kolaboratif yang mampu memberikan perkembangan yang positif bagi produksi olahan ikan teri.

Untuk mengatasi masalah ongkos kirim dapat dilakukan dengan pembangunan jaringan kerja sama atau kemitraan dengan penyedia jasa ekspedisi yang memiliki biaya lebih rendah dibandingkan jasa pengiriman konvensional dan membangun komitmen dan meningkatkan kualitas pengemasan barang yang lebih kuat dan tahan lama untuk menjaga kondisi produk mengingat kecenderungan kerusakan barang lebih sering terjadi pada jasa ekspedisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, dkk. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi
- Barti, H. H., & Priyadi, M. P. (2020). *Optimalisasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi
- Edi Suharto, (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*” Bandung: PT Ravika Adimatama.
- Gitosaputro, S & Rangga, K.K. (2015). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haeruman, H. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2016). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, Totok & Soebiato poerwoko. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok. (2014). *CSR Responsibility, Tanggungjawab* Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, Andri. (2005). *Peran Informasi Leader dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Robbins. (2000). *Keterampilan Dasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprit Jatinegoro,
- Siagian, S. P. (1994). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan masyarakat: mungkinkah muncul antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Supriyadi, Edy. (2007). *Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 18(2): 103-123.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Jakarta.
- Widanti, Ni Putu Trika, (2011), *Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Di Bali*, Depansar: Jagatpress.
- Widjaja, H.A.W. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada